



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS dan Pihak lain di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan agar sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan pengaturan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost);
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Balikpapan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

7. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Tenaga Honor Daerah dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang diangkat guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat teknis operasional dan administrasi.
9. Pihak lain adalah pihak yang membantu kegiatan Pemerintah Kota baik yang berdasarkan Perjanjian Kerja maupun pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu Pemerintah Kota dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Surat Tugas adalah bentuk persetujuan tertulis kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS serta pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS serta pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Bukti Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas, terdiri:
 - a. Perjalanan dinas di wilayah Kalimantan Timur; dan
 - b. Perjalanan dinas di luar wilayah Kalimantan Timur.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Kota Balikpapan dalam radius sekurang-kurangnya 5 (lima) km dari jarak batas wilayah.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Kalimantan Timur.

Pasal 3

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:

- a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- b. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/CPNS, Pegawai Non PNS dan Pihak lain yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

- c. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/CPNS, Pegawai Non PNS dan Pihak lain yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke daerah tempat pemakaman;
- d. pemetian jenazah.

BAB III

TATA CARA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisien, efektif dan ekonomis.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS dan pihak lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan Surat Tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sebagai berikut:
 - a. Walikota/Wakil Walikota untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon IIb dan Pejabat Eselon III;
 - c. Asisten Administrasi Umum untuk Pejabat Eselon IV/PNS non Eselon/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai non PNS yang menggunakan anggaran SKPD;
 - d. Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah untuk Pihak lain.
- (2) Dalam hal Asisten Administrasi Umum berhalangan karena sakit, cuti atau tugas perjalanan dinas, maka Asisten yang membidangi atau membawahkan SKPD berwenang untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), sebagai berikut:

- a. Walikota/Wakil Walikota untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II b dan Eselon III;
 - c. Asisten Administrasi Umum untuk Pejabat Eselon IV, PNS non Eselon, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai non PNS dan Pihak Lain yang menggunakan anggaran Sekretariat Daerah;
 - d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pejabat Eselon IV, PNS non Eselon, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai non PNS dan Pihak Lain yang menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum berwenang untuk melakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan karena sakit, cuti atau tugas perjalanan dinas.
 - (3) Dalam hal Asisten Administrasi Umum berhalangan karena sakit, cuti atau tugas perjalanan dinas, maka Asisten yang membidangi atau membawahkan SKPD berwenang untuk melakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (4) Proses penandatanganan Surat Tugas dan SPPD diwajibkan melampirkan asli Permohonan/Perintah tertulis yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
 - (5) Bentuk dan format permohonan perjalanan dinas, Surat Tugas, SPPD dan Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan biaya berupa:
 - a. Uang Saku, meliputi:
 1. Uang harian;
 2. Uang Makan;
 3. Angkutan Lokal;
 4. Airport tax;
 - b. Transportasi Pegawai, meliputi:
 1. Tiket transportasi udara,
 2. Taksi bandara;
 3. Angkutan luar antar daerah.
 - c. Biaya BBM Angkutan Darat Perjalanan Dinas Wilayah Kalimantan Timur;
 - d. Biaya penginapan;
 - e. Uang Representatif yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat PNS Eselon II.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pengaturan:

- a. Uang saku, taxi bandara, dan angkutan luar antar daerah serta biaya BBM angkutan darat perjalanan dinas wilayah Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;
 - b. Biaya penginapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini;
 - c. Biaya Pemetian dan angkutan jenazah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
- (3) Biaya tiket transportasi udara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dibayar sesuai kenyataan (at cost) berdasarkan klasifikasi:
 - a. Kelas Bisnis diperuntukan bagi Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD;
 - b. Kelas Ekonomi diperuntukan bagi Anggota DPRD, PNS Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan PNS non Eselon serta juga diperuntukan bagi Pegawai Non PNS dan Pihak Lain.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam waktu 1 (satu) hari ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Samarinda tidak diberikan biaya penginapan.
- (5) Khusus Biaya Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional, sebagai berikut:
 - a. Golongan IV disetarakan dengan PNS Eselon IV; dan
 - b. Golongan III disetarakan dengan PNS Golongan IV non eselon.
- (6) Biaya perjalanan dinas pihak lain khusus untuk:
 - a. Unsur Muspida disetarakan dengan PNS Eselon II;
 - b. Isteri Walikota, isteri Wakil Walikota dan isteri Sekretaris Daerah disetarakan dengan PNS Eselon III;
 - c. Isteri/suami PNS Eselon IIB disetarakan dengan PNS Eselon IV;
 - d. Isteri/suami PNS Eselon III disetarakan dengan PNS Golongan III;
 - e. Isteri/suami PNS Eselon IV disetarakan dengan PNS Golongan II.
- (7) Biaya pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan Pihak Lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Tenaga Bantuan (Naban), hanya diberikan biaya transportasi udara (at cost)/angkutan darat dan akomodasi setara biaya perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (8) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (9) Pemberian biaya perjalanan dinas dihitung berdasarkan kebutuhan hari perjalanan dinas dengan pelaksanaan 1 (satu) hari sebelum acara dan 1 (satu) hari sesudah acara dilaksanakan atau sesuai dengan kebijakan pejabat yang berwenang memberikan jumlah hari perjalanan dinas.
- (10) Khusus perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) tujuan maka diberikan biaya transportasi antar daerah dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan transportasi udara (at cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (11) Biaya transportasi udara (at cost) dibayarkan setelah kembali dari perjalanan dinas.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Non PNS/Pihak lain yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan secara tertulis dan dapat mempresentasikan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas.

Pasal 9

- (1) Laporan pelaksanaan tugas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari Laporan Tertulis Perjalanan Dinas, Surat Tugas, SPPD dan transportasi (at cost) menggunakan pesawat serta melampirkan boarding pass dan airport tax.
- (2) Bentuk dan format Laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/CPNS/Pegawai Non PNS/Pihak lain yang tidak mempertanggungjawabkan laporan perjalanan dinas tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya sampai yang bersangkutan membuat laporan perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat buku pencatatan perjalanan dinas.
- (2) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Non PNS/Pihak lain yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Tindakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Balikpapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Desember 2011

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

PERMOHONAN PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman RT.13 Telp. : 421500, 421600, 423852, 423864, 735017, Fax. 425412
BALIKPAPAN

Kode Pos 75100

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. :
Dari :
Nomor :
Tanggal :
Perihal :

I. Dasar :

II. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas :

- a. Maksud :
b. Tujuan :

III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

- a. Waktu :
b. Tempat :

IV. Pimpinan/Peserta Perjalanan Dinas :

V. Sumber Pembiayaan :

VI. Saran dan Tindak Lanjut :

Demikian Permohonan ini disampaikan, mohon pertimbangan dan persetujuan.

Kepala.....

Nama
NIP.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SURAT TUGAS



WALIKOTA BALIKPAPAN

SURAT TUGAS

Nomor :

Dasar	:	
Tanggal	:	
Kepada	:	1 . Nama Jabatan Gol .
		2 . Nama Jabatan Gol .
		3 . Nama Jabatan Gol .

Untuk : Dalam rangka

Tempat :

Lama Perjalanan Dinas : () hari

Tanggal Perjalanan Dinas :

Keterangan :

Setelah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan secara tertulis, kepada Pemberi Tugas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan tugas.

Demikian Surat Tugas diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Balikpapan
pada tanggal :

WALIKOTA BALIKPAPAN

=====



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman RT.13 Telp. : 421500, 421600, 423852, 423864, 735017, Fax. 425412
BALIKPAPAN

Kode Pos 75100

SURAT TUGAS

Nomor :

Dasar :

Tanggal :

Kepada :	1	Nama		Gol.
		Jabatan		
	2	Nama		Gol.
		Jabatan		
	3	Nama		THL
		Jabatan		

Untuk : Dalam rangka

Tempat :

Lama Perjalanan Dinas : () Hari

Tanggal Perjalanan Dinas : s.d. bulan Tahun

Keterangan :

Setelah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan secara tertulis, kepada Pemberi Tugas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan tugas.

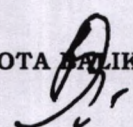
Demikian Surat Tugas diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Balikpapan
pada tanggal : _____

.....

NIP.

WALIKOTA BALIKPAPAN


M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



WALIKOTA BALIKPAPAN

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR :

I. Berangkat dari : Balikpapan
(Tempat kedudukan)

Ke : -
Pada tanggal : - - -
Kepada :

WALIKOTA BALIKPAPAN

1.	Pejabat yang berwenang memberikan perintah	:	WALIKOTA BALIKPAPAN		
2.	Nama pegawai yang diperintahkan	:			
3.	a. Pangkat / Golongan (PP.No.15 Tahun 1993)	:			
	b. J a b a t a n	:			
	c. Tingkat menurut peraturan perjalanan Dinas	:			
4.	Maksud perjalanan dinas	:			
5.	Alat angkut yang dipergunakan	:	Angkutan	:	-
6.	a. Tempat berangkat	:	Balikpapan		
	b. Tempat dituju	:	-		
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	:	2	(dua)	Hari
	b. Tanggal berangkat	:	-	-	-
	c. Tanggal harus kembali	:	-	-	-
8.	Pengikut		N a m a		Hubungan Kedinasan
					Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran				
	a. Instansi	:			
	b. Mata Anggaran	:			
10.	Ket. Lain - lain	:			

II. Tiba di	:	-	Berangkat dari	:	-
Pada Tanggal	:	- - -	Ke	:	Balikpapan
Kepala	:		Pada Tanggal	:	- - -
			Kepala	:	
III. Tiba di	:		Berangkat dari	:	
Pada Tanggal	:		Ke	:	
Kepala	:		Pada Tanggal	:	
			Kepala	:	
IV. Tiba kembali di	:	Balikpapan	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya		
(Tempat kedudukan)					
Pejabat yang memberi perintah					
WALIKOTA BALIKPAPAN					

DATATAN :

Setibanya di tempat yang dituju agar SPPD ini dari lembaran 1 s/d 3 ditujukan untuk diketahui / disahkan oleh Pejabat yang berwenang di tempat itu

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal :

WALIKOTA BALIKPAPAN



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR :

I. Berangkat dari : Balikpapan
(Tempat kedudukan)
Ke : -
Pada tanggal : - - -
Kepada :

NIP.

II. Tiba di : - Pada Tanggal : - - - Kepala :	Berangkat dari : - Ke : Balikpapan Pada Tanggal : - - - Kepala :
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
IV. Tiba kembali di : Balikpapan (Tempat kedudukan) Pejabat yang memberi perintah :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya
NIP.	

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

1. Pejabat yang berwenang memberikan perintah	: SEKRETARIS DAERAH KOTA		
2. Nama pegawai yang diperintahkan	:		
3. a. Pangkat / Golongan (PP.No.15 Tahun 1993) b. J a b a t a n c. Tingkat menurut peraturan perjalanan Dinas	: : :		
4. Maksud perjalanan dinas	:		
5. Alat angkut yang dipergunakan	: Angkutan : -		
6. a. Tempat berangkat b. Tempat dituju	: Balikpapan : -		
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	: - () Hari : - - : - -		
8. Pengikut	N a m a	Hubungan Kedinasan	Keterangan
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	: : :		
10. Keterangan Lain - lain	:		

CATATAN :
Setibanya di tempat yang dituju agar SPPD ini dari lembaran 1 s/d.3 ditujukan untuk diketahui / disahkan oleh Pejabat yang berwenang di tempat itu

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal :

NIP.

KWITANSI



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH

K W I T A N S I

Tahun Anggaran :
Mata Anggaran :
No. Bukti :

Terima dari : Pengguna Anggaran Setda Kota Balikpapan

Uang Sejumlah : Rp. , - ()

Untuk Keperluan : Biaya perjalanan dinas ke
AN.
Dalam rangka

Sesuai dengan perincian No.

Mengetahui/Menyetujui Nip.	Tanggal, Yang membayar Nip.	Tanggal, Yang Menerima Nip.
--	--	--

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PERJALANAN DINAS

UANG SAKU PERJALANAN DINAS, TAXI BANDARA DAN ANGKUTAN LUAR ANTAR DAERAH

NO.	BIAYA	WALIKOTA / WAWALI KETUA/WK.KETUA DPRD	ESELON II/a	ESELON II/b ANGGOTA DPRD	ESELON III	ESELON IV	GOL. IV	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS/ Pegawai Non PNS	Naban
1	Uang Saku di Luar wil Kaltim Hari ke empat per hari dan Uang Saku dalam wilayah Kaltim per hari	Rp 900,000	Rp 825,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 350,000
2	Taxi Bandara	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 300,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000
3	Angkutan Luar antar Daerah	Rp 1,500,000	Rp 1,350,000	Rp 1,250,000	Rp 1,200,000	Rp 1,150,000	Rp 1,100,000	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 850,000	Rp 750,000

BIAYA BBM ANGKUTAN DARAT PERJALANAN DINAS WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	KETERANGAN TRANSPORT / BBM	WALIKOTA / WAWALI KETUA/WK.KETUA DPRD	ESELON II/a	ESELON II/b ANGGOTA DPRD	ESELON III	ESELON IV	GOL. IV	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS/ Pegawai Non PNS	Naban
1	SAMARINDA	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 300,000
2	BONTANG	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 500,000
3	KUTAI TIMUR	Rp 1,100,000	Rp 1,050,000	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 600,000
4	KUTAI KERTANEGARA	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 350,000
5	PENAJAM PASER UTARA	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 500,000
6	PASER	Rp 1,250,000	Rp 1,200,000	Rp 1,150,000	Rp 1,100,000	Rp 1,050,000	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 750,000

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

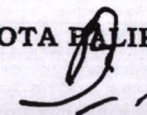
LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PERJALANAN DINAS

BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

No.	Provinsi	TARIF RATA-RATA HOTEL															
		Walikota / Wawali Ketua / Wk.Ketua DPRD		Eselon II/a	Eselon II/b Anggota DPRD		Eselon III	Eselon IV	Gol IV & III	Gol II	Gol I/CPNS/ Non PNS/ Naban						
1	Aceh Darussalam	Rp	950,000	Rp	750,000	Rp	500,000	Rp	400,000	Rp	350,000	Rp	250,000	Rp	200,000	Rp	150,000
2	Bali	Rp	1,750,000	Rp	1,500,000	Rp	1,100,000	Rp	900,000	Rp	850,000	Rp	700,000	Rp	450,000	Rp	400,000
3	Bangka Belitung	Rp	750,000	Rp	650,000	Rp	400,000	Rp	350,000	Rp	350,000	Rp	250,000	Rp	150,000	Rp	100,000
4	Banten	Rp	950,000	Rp	750,000	Rp	500,000	Rp	400,000	Rp	400,000	Rp	300,000	Rp	200,000	Rp	150,000
5	Bengkulu	Rp	900,000	Rp	650,000	Rp	400,000	Rp	350,000	Rp	350,000	Rp	300,000	Rp	200,000	Rp	150,000
6	DI. Yogyakarta	Rp	1,200,000	Rp	850,000	Rp	550,000	Rp	450,000	Rp	400,000	Rp	300,000	Rp	200,000	Rp	150,000
7	DKI. Jakarta	Rp	1,200,000	Rp	1,000,000	Rp	750,000	Rp	650,000	Rp	550,000	Rp	400,000	Rp	350,000	Rp	250,000
8	Gorontalo	Rp	1,000,000	Rp	750,000	Rp	500,000	Rp	450,000	Rp	450,000	Rp	300,000	Rp	150,000	Rp	100,000
9	Irian Jaya Barat	Rp	950,000	Rp	750,000	Rp	500,000	Rp	400,000	Rp	400,000	Rp	300,000	Rp	200,000	Rp	150,000
10	Jambi	Rp	900,000	Rp	750,000	Rp	500,000	Rp	400,000	Rp	300,000	Rp	200,000	Rp	150,000	Rp	100,000
11	Jawa Barat	Rp	1,250,000	Rp	950,000	Rp	600,000	Rp	500,000	Rp	450,000	Rp	350,000	Rp	250,000	Rp	200,000
12	Jawa Tengah	Rp	1,200,000	Rp	950,000	Rp	600,000	Rp	450,000	Rp	450,000	Rp	350,000	Rp	250,000	Rp	200,000
13	Jawa Timur	Rp	1,200,000	Rp	950,000	Rp	600,000	Rp	500,000	Rp	450,000	Rp	350,000	Rp	250,000	Rp	200,000
14	Kalimantan Barat	Rp	950,000	Rp	750,000	Rp	500,000	Rp	450,000	Rp	350,000	Rp	250,000	Rp	200,000	Rp	150,000
15	Kalimantan Selatan	Rp	900,000	Rp	750,000	Rp	500,000	Rp	450,000	Rp	400,000	Rp	250,000	Rp	150,000	Rp	100,000
16	Kalimantan Tengah	Rp	900,000	Rp	750,000	Rp	500,000	Rp	400,000	Rp	350,000	Rp	250,000	Rp	200,000	Rp	150,000
17	Kalimantan Timur	Rp	1,250,000	Rp	950,000	Rp	650,000	Rp	550,000	Rp	500,000	Rp	350,000	Rp	200,000	Rp	150,000
18	Kepulauan Riau	Rp	1,200,000	Rp	750,000	Rp	450,000	Rp	400,000	Rp	350,000	Rp	200,000	Rp	150,000	Rp	100,000
19	Lampung	Rp	950,000	Rp	700,000	Rp	400,000	Rp	350,000	Rp	350,000	Rp	300,000	Rp	200,000	Rp	150,000
20	Maluku	Rp	900,000	Rp	750,000	Rp	450,000	Rp	400,000	Rp	300,000	Rp	200,000	Rp	150,000	Rp	100,000
21	Maluku Utara	Rp	900,000	Rp	750,000	Rp	450,000	Rp	350,000	Rp	300,000	Rp	200,000	Rp	150,000	Rp	100,000

No.	Provinsi	TARIF RATA-RATA HOTEL								
		Walikota / Wawali Ketua / Wk.Ketua DPRD	Eselon II/a	Eselon II/b Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV	Gol IV & III	Gol II	Gol I/CPNS/ Non PNS/ Naban	
22	Nusa Tenggara Barat	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
23	Nusa Tenggara Timur	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
24	Papua	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
25	Riau	Rp 1,100,000	Rp 750,000	Rp 650,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 350,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
26	Sulawesi Barat	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
27	Sulawesi Selatan	Rp 1,100,000	Rp 750,000	Rp 650,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 350,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
28	Sulawesi Tengah	Rp 1,000,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 150,000	Rp 100,000	
29	Sulawesi Tenggara	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
30	Sulawesi Utara	Rp 1,100,000	Rp 750,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 350,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
31	Sumatera Barat	Rp 1,000,000	Rp 700,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
32	Sumatera Selatan	Rp 1,200,000	Rp 950,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
33	Sumatera Utara	Rp 1,200,000	Rp 950,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 250,000	Rp 200,000	

WALIKOTA BALIKPAPAN,



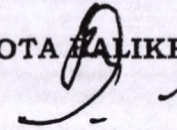
M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PERJALANAN DINAS

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	WALIKOTA/ WAKIL	ESELON II	ESELON III/ESELON IV/ GOL.IV	GOL. III/GOL.II/GOL.I/ Non PNS/Pihak Lain
1	Biaya Pemetian	Rp 4,500,000	Rp 4,000,000	Rp 3,500,000	Rp 3,000,000
2	Biaya Pengangkutan	Sesuai tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

WALIKOTA BALIKPAPAN,


M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PERJALANAN DINAS

CONTOH PENGHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

No.	Tujuan : Jakarta	Tiga Hari	Walikota / Wawali Ketua/Wk.Ketua DPRD	JUMLAH	Eselon II/a	JUMLAH
1.	Uang Representatif	1	Rp 600,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 450,000
2.	Uang Saku	1	Rp 2,700,000	Rp 2,700,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
3.	Tiket Pesawat (At Cost)	1	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Taxi Bandara	1	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
5.	Biaya Penginapan	2	Rp 1,200,000	Rp 2,400,000	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
TOTAL				Rp 6,100,000		Rp 5,250,000

No.	Tujuan : Jakarta	Tiga Hari	Eselon II/b Anggota DPRD	JUMLAH	Eselon III	JUMLAH
1.	Uang Representatif	1	Rp 250,000	Rp 250,000		
2.	Uang Saku	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp 1,750,000	Rp 1,750,000
3.	Tiket Pesawat (At Cost)	1	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Taxi Bandara	1	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000
5.	Biaya Penginapan	2	Rp 750,000	Rp 1,500,000	Rp 650,000	Rp 1,300,000
TOTAL				Rp 4,050,000		Rp 3,350,000

No.	Tujuan : Jakarta	Tiga Hari	Eselon IV	JUMLAH	Gol IV	JUMLAH
1.	Uang Representatif					
2.	Uang Saku	1	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000
3.	Tiket Pesawat (At Cost)	1	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Taxi Bandara	1	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 225,000
5.	Biaya Penginapan	2	Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 400,000	Rp 800,000
TOTAL				Rp 2,850,000		Rp 2,225,000

No.	Tujuan : Jakarta	Empat Hari	Walikota / Wawali Ketua/Wk.Ketua DPRD	JUMLAH	Eselon II/a	JUMLAH
1.	Uang Representatif	1	Rp 600,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 450,000
2.	Uang Saku	1	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	Rp 3,325,000	Rp 3,325,000
3.	Tiket Pesawat (At Cost)	1	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Taxi Bandara	1	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
5.	Biaya Penginapan	3	Rp 1,200,000	Rp 3,600,000	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
TOTAL				Rp 8,200,000		Rp 7,075,000

No.	Tujuan : Jakarta	Empat Hari	Eselon II/b Anggota DPRD	JUMLAH	Eselon III	JUMLAH
1.	Uang Representatif	1	Rp 250,000	Rp 250,000		
2.	Uang Saku	1	Rp 2,750,000	Rp 2,750,000	Rp 2,450,000	Rp 2,450,000
3.	Tiket Pesawat (At Cost)	1	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Taxi Bandara	1	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000
5.	Biaya Penginapan	3	Rp 750,000	Rp 2,250,000	Rp 650,000	Rp 1,950,000
TOTAL				Rp 5,550,000		Rp 4,700,000

No.	Tujuan : Jakarta	Empat Hari	Eselon IV	JUMLAH	Gol IV	JUMLAH
1.	Uang Representatif					
2.	Uang Saku	1	Rp 2,150,000	Rp 2,150,000	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000
3.	Tiket Pesawat (At Cost)	1	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Taxi Bandara	1	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 225,000
5.	Biaya Penginapan	3	Rp 550,000	Rp 1,650,000	Rp 400,000	Rp 1,200,000
TOTAL				Rp 4,050,000		Rp 3,225,000

No.	Tujuan : Jakarta	Tiga Hari	Gol III	JUMLAH	Gol II	JUMLAH
1.	Uang Representatif					
2.	Uang Saku	1	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
3.	Tiket Pesawat (At Cost)	1	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Taxi Bandara	1	Rp 225,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 200,000
5.	Biaya Penginapan	2	Rp 400,000	Rp 800,000	Rp 350,000	Rp 700,000
TOTAL				Rp 2,225,000		Rp 1,900,000

No.	Tujuan : Jakarta	Tiga Hari	Gol I/CPNS/Pegawai Non PNS	JUMLAH	Naban	JUMLAH
1.	Uang Representatif					
2.	Uang Saku	1	Rp 950,000	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 750,000
3.	Tiket Pesawat (At Cost)	1	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Taxi Bandara	1	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000
5.	Biaya Penginapan	2	Rp 250,000	Rp 500,000	Rp 250,000	Rp 500,000
TOTAL				Rp 1,650,000		Rp 1,450,000

No.	Tujuan : Jakarta	Empat Hari	Gol III	JUMLAH	Gol II	JUMLAH
1.	Uang Representatif					
2.	Uang Saku	1	Rp 1,750,000	Rp 1,750,000	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
3.	Tiket Pesawat (At Cost)	1	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Taxi Bandara	1	Rp 225,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 200,000
5.	Biaya Penginapan	3	Rp 400,000	Rp 1,200,000	Rp 350,000	Rp 1,050,000
TOTAL				Rp 3,175,000		Rp 2,750,000

No.	Tujuan : Jakarta	Empat Hari	Gol I/CPNS/Pegawai Non PNS	JUMLAH	Naban	JUMLAH
1.	Uang Representatif					
2.	Uang Saku	1	Rp 1,350,000	Rp 1,350,000	Rp 1,100,000	Rp 1,100,000
3.	Tiket Pesawat (At Cost)	1	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Taxi Bandara	1	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000
5.	Biaya Penginapan	3	Rp 250,000	Rp 750,000	Rp 250,000	Rp 750,000
TOTAL				Rp 2,300,000		Rp 2,050,000

CONTOH PENGHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

No.	Tujuan : Samarinda	Satu Hari	Walikota / Wawali Ketua/Wk.Ketua DPRD	JUMLAH	Eselon II/a	JUMLAH
1.	Uang Representatif	1	Rp 600,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 450,000
2.	Uang Saku	1	Rp 900,000	Rp 900,000	Rp 825,000	Rp 825,000
3.	BBM	1	Rp 750,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 700,000
TOTAL				Rp 2,250,000		Rp 1,975,000

No.	Tujuan : Samarinda	Satu Hari	Eselon II/b Anggota DPRD	JUMLAH	Eselon III	JUMLAH
1.	Uang Representatif	1	Rp 250,000	Rp 250,000		
2.	Uang Saku	1	Rp 750,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 700,000
3.	BBM	1	Rp 650,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 600,000
TOTAL				Rp 1,650,000		Rp 1,300,000

No.	Tujuan : Samarinda	Satu Hari	Eselon IV	JUMLAH	Gol IV	JUMLAH
1.	Uang Saku	1	Rp 650,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 600,000
2.	BBM	1	Rp 550,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 500,000
TOTAL				Rp 1,200,000		Rp 1,100,000

No.	Tujuan : Samarinda	Satu Hari	Gol III	JUMLAH	Gol II	JUMLAH
1.	Uang Saku	1	Rp 550,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 500,000
2.	BBM	1	Rp 450,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 400,000
TOTAL				Rp 1,000,000		Rp 900,000

No.	Tujuan : Samarinda	Satu Hari	Gol I/CPNS/Pegawai Non PNS	JUMLAH	Naban	JUMLAH
1.	Uang Saku	1	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 350,000
2.	BBM	1	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
TOTAL				Rp 800,000		Rp 650,000

CONTOH PENGHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

No.	Tujuan : Samarinda	Dua Hari	Walikota / Wawali Ketua/Wk.Ketua DPRD	JUMLAH	Eselon II/a	JUMLAH
1.	Uang Representatif	1	Rp 600,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 450,000
2.	Uang Saku	2	Rp 900,000	Rp 1,800,000	Rp 825,000	Rp 1,650,000
3.	BBM	1	Rp 750,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 700,000
4.	Penginapan	1	Rp 1,250,000	Rp 1,250,000	Rp 950,000	Rp 950,000
TOTAL				Rp 4,400,000		Rp 3,750,000

No.	Tujuan : Samarinda	Dua Hari	Eselon II/b Anggota DPRD	JUMLAH	Eselon III	JUMLAH
1.	Uang Representatif	1	Rp 250,000	Rp 250,000		
2.	Uang Saku	2	Rp 750,000	Rp 1,500,000	Rp 700,000	Rp 1,400,000
3.	BBM	1	Rp 650,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 600,000
4.	Penginapan	1	Rp 650,000	Rp 650,000	Rp 550,000	Rp 550,000
TOTAL				Rp 3,050,000		Rp 2,550,000

No.	Tujuan : Samarinda	Dua Hari	Eselon IV	JUMLAH	Gol IV	JUMLAH
1.	Uang Saku	2	Rp 650,000	Rp 1,300,000	Rp 600,000	Rp 1,200,000
2.	BBM	1	Rp 550,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 500,000
3.	Penginapan	1	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 350,000	Rp 350,000
TOTAL				Rp 2,350,000		Rp 2,050,000

No.	Tujuan : Samarinda	Dua Hari	Gol III	JUMLAH	Gol II	JUMLAH
1.	Uang Saku	2	Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 500,000	Rp 1,000,000
2.	BBM	1	Rp 450,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 400,000
3.	Penginapan	1	Rp 350,000	Rp 350,000	Rp 200,000	Rp 200,000
TOTAL				Rp 1,900,000		Rp 1,600,000

No.	Tujuan : Samarinda	Dua Hari	Gol I/CPNS/Pegawai Non PNS	JUMLAH	Naban	JUMLAH
1.	Uang Saku	2	Rp 400,000	Rp 800,000	Rp 350,000	Rp 700,000
2.	BBM	1	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
3.	Penginapan	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000
TOTAL				Rp 1,350,000		Rp 1,150,000

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 26 TAHUN 2011
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LEBIH DARI 1 (SATU) TUJUAN

No.	Tujuan :	Jakarta	1 Hari	3 Hari	Walikota / Wawali Ketua/Wk.Ketua DPRD	JUMLAH	Eselon II/a	JUMLAH
		Yogyakarta	2 Hari					
1.	Uang Representatif		1		Rp 600,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 450,000
2.	Uang Saku		1		Rp 2,700,000	Rp 2,700,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
3.	Tiket Pesawat Jakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Tiket Pesawat Yogyakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
5.	Taxi Bandara		2		Rp 400,000	Rp 800,000	Rp 300,000	Rp 600,000
6.	Biaya Penginapan (Yogyakarta)		2		Rp 1,200,000	Rp 2,400,000	Rp 850,000	Rp 1,700,000
TOTAL						Rp 6,500,000		Rp 5,250,000

No.	Tujuan :	Jakarta	1 Hari	3 Hari	Eselon II/b Anggota DPRD	JUMLAH	Eselon III	JUMLAH
		Yogyakarta	2 Hari					
1.	Uang Representatif		1		Rp 250,000	Rp 250,000		
2.	Uang Saku		1		Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp 1,750,000	Rp 1,750,000
3.	Tiket Pesawat Jakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Tiket Pesawat Yogyakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
5.	Taxi Bandara		2		Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 300,000	Rp 600,000
6.	Biaya Penginapan (Yogyakarta)		2		Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 450,000	Rp 900,000
TOTAL						Rp 3,950,000		Rp 3,250,000

No.	Tujuan :	Jakarta	1 Hari	3 Hari	Eselon IV	JUMLAH	Gol IV	JUMLAH
		Yogyakarta	2 Hari					
1.	Uang Representatif							
2.	Uang Saku		1		Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000
3.	Tiket Pesawat Jakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Tiket Pesawat Yogyakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
5.	Taxi Bandara		2		Rp 250,000	Rp 500,000	Rp 225,000	Rp 450,000
6.	Biaya Penginapan (Yogyakarta)		2		Rp 400,000	Rp 800,000	Rp 300,000	Rp 600,000
TOTAL						Rp 2,800,000		Rp 2,250,000

No.	Tujuan :	Jakarta	1 Hari	3 Hari	Gol III	JUMLAH	Gol II	JUMLAH
		Yogyakarta	2 Hari					
1.	Uang Representatif							
2.	Uang Saku		1		Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
3.	Tiket Pesawat Jakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Tiket Pesawat Yogyakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
5.	Taxi Bandara		2		Rp 225,000	Rp 450,000	Rp 200,000	Rp 400,000
6.	Biaya Penginapan (Yogyakarta)		2		Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 200,000	Rp 400,000
TOTAL						Rp 2,250,000		Rp 1,800,000

No.	Tujuan :	Jakarta	1 Hari	3 Hari	Gol I/CPNS/Pegawai Non PNS	JUMLAH	Naban	JUMLAH
		Yogyakarta	2 Hari					
1.	Uang Representatif							
2.	Uang Saku		1		Rp 950,000	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 750,000
3.	Tiket Pesawat Jakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Tiket Pesawat Yogyakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
5.	Taxi Bandara		2		Rp 200,000	Rp 400,000	Rp 200,000	Rp 400,000
6.	Biaya Penginapan (Yogyakarta)		2		Rp 150,000	Rp 300,000	Rp 150,000	Rp 300,000
TOTAL						Rp 1,650,000		Rp 1,450,000

CONTOH RINCIAN PENGHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS LEBIH DARI 1 (SATU) TUJUAN

No.	Tujuan :	Jakarta	2 Hari	4 Hari	Walikota / Wawali Ketua/Wk.Ketua DPRD	JUMLAH	Eselon II/a	JUMLAH
		Yogyakarta	2 Hari					
1.	Uang Representatif		1		Rp 600,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 450,000
2.	Uang Saku		1		Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	Rp 3,325,000	Rp 3,325,000
3.	Tiket Pesawat Jakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Tiket Pesawat Yogyakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
5.	Taxi Bandara		2		Rp 400,000	Rp 800,000	Rp 300,000	Rp 600,000
6.	Biaya Penginapan (JKT)		1		Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
7.	Biaya Penginapan (yogya)		2		Rp 1,200,000	Rp 2,400,000	Rp 850,000	Rp 1,700,000
TOTAL						Rp 8,600,000		Rp 7,075,000

No.	Tujuan :	Jakarta	2 Hari	4 Hari	Eselon II/b Anggota DPRD	JUMLAH	Eselon III	JUMLAH
		Yogyakarta	2 Hari					
1.	Uang Representatif		1		Rp 250,000	Rp 250,000		
2.	Uang Saku		1		Rp 2,750,000	Rp 2,750,000	Rp 2,450,000	Rp 2,450,000
3.	Tiket Pesawat Jakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Tiket Pesawat Yogyakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
5.	Taxi Bandara		2		Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 300,000	Rp 600,000
6.	Biaya Penginapan (JKT)		1		Rp 750,000	Rp 750,000	Rp 650,000	Rp 650,000
7.	Biaya Penginapan (yogya)		2		Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 450,000	Rp 900,000
TOTAL						Rp 5,450,000		Rp 4,600,000

No.	Tujuan :	Jakarta	2 Hari	4 Hari	Eselon IV	JUMLAH	Gol IV	JUMLAH
		Yogyakarta	2 Hari					
1.	Uang Representatif							
2.	Uang Saku		1		Rp 2,150,000	Rp 2,150,000	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000
3.	Tiket Pesawat Jakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Tiket Pesawat Yogyakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
5.	Taxi Bandara		2		Rp 250,000	Rp 500,000	Rp 225,000	Rp 450,000
6.	Biaya Penginapan (JKT)		1		Rp 550,000	Rp 550,000	Rp 400,000	Rp 400,000
7.	Biaya Penginapan (yogya)		2		Rp 400,000	Rp 800,000	Rp 300,000	Rp 600,000
TOTAL						Rp 4,000,000		Rp 3,250,000

No.	Tujuan :	Jakarta	2 Hari	4 Hari	Gol III	JUMLAH	Gol II	JUMLAH
		Yogyakarta	2 Hari					
1.	Uang Representatif							
2.	Uang Saku		1		Rp 1,750,000	Rp 1,750,000	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
3.	Tiket Pesawat Jakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Tiket Pesawat Yogyakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
5.	Taxi Bandara		2		Rp 225,000	Rp 450,000	Rp 200,000	Rp 400,000
6.	Biaya Penginapan (JKT)		1		Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 350,000
7.	Biaya Penginapan (yogya)		2		Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 200,000	Rp 400,000
TOTAL						Rp 3,200,000		Rp 2,650,000

No.	Tujuan :	Jakarta	2 Hari	4 Hari	Gol I/CPNS/Pegawai Non PNS	JUMLAH	Naban	JUMLAH
		Yogyakarta	2 Hari					
1.	Uang Representatif							
2.	Uang Saku		1		Rp 1,350,000	Rp 1,350,000	Rp 1,100,000	Rp 1,100,000
3.	Tiket Pesawat Jakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
4.	Tiket Pesawat Yogyakarta (At Cost)		1		(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)	(At Cost)
5.	Taxi Bandara		2		Rp 200,000	Rp 400,000	Rp 200,000	Rp 400,000
6.	Biaya Penginapan (JKT)		1		Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000
7.	Biaya Penginapan (yogya)		2		Rp 150,000	Rp 300,000	Rp 150,000	Rp 300,000
TOTAL						Rp 2,300,000		Rp 2,050,000

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS
YANG DITUJUKAN KEPADA WALIKOTA



WALIKOTA BALIKPAPAN

LAPORAN PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA

- 1 . Dasar :
- 2 . Maksud dan Tujuan :
- 3 . Waktu dan Tempat Pelaksanaan :
 - a. Waktu :
 - b. Tempat :
- 4 . Pimpinan/Peserta Perjalanan Dinas :
- 5 . Pembahasan :
(menurut maksud dan tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas)
- 6 . Kesimpulan/ Hasil Perjalanan Dinas :

Balikpapan,
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

1 . :
2 dst. :

CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS
YANG DITUJUKAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH/ASISTEN



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman RT.13 Telp. : 421500, 421600, 423852, 423864, 735017, Fax. 425412
BALIKPAPAN

Kode Pos 75100

LAPORAN PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA

- 1 . Dasar :
- 2 . Maksud dan Tujuan :
- 3 . Waktu dan Tempat Pelaksanaan :
a. Waktu :
b. Tempat :
- 4 . Pimpinan/Peserta Perjalanan Dinas :
- 5 . Pembahasan :
(menurut maksud dan tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas)
- 6 . Kesimpulan/ Hasil Perjalanan Dinas :

Balikpapan,
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

- 1 . :
 - 2 . :
- dst.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI